



Peran KJRI Dalam Mempromosikan Industri Halal di Mindanao Filipina

Muhammad Tetuko¹⁾, Nur Azizah²⁾

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

m.tetuko.isip20@mail.umy.ac.id¹⁾
nurazizah@umy.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dalam mempromosikan industri halal di Mindanao, Filipina. Sebagai wilayah dengan populasi Muslim yang signifikan, Mindanao memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, baik dalam sektor makanan, kosmetik, maupun pariwisata. Studi ini menganalisis strategi yang diterapkan oleh KJRI dalam meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Filipina melalui diplomasi ekonomi, promosi produk halal Indonesia, serta fasilitasi kemitraan bisnis antara pelaku usaha kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJRI memainkan peran strategis dalam membangun ekosistem halal di Mindanao dengan mendorong regulasi, sertifikasi halal, serta memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan. Namun, tantangan seperti perbedaan regulasi halal dan kurangnya pemahaman masyarakat lokal terhadap produk halal Indonesia masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi Islam dalam memperluas industri halal di kawasan tersebut.

Kata kunci: KJRI, Industri Halal, Diplomasi Ekonomi

Abstract

This study examines the role of the Consulate General of the Republic of Indonesia (KJRI) in promoting the halal industry in Mindanao, the Philippines. As a region with a significant Muslim population, Mindanao holds great potential for the development of the halal industry, particularly in the food, cosmetics, and tourism sectors. This research analyzes the strategies implemented by KJRI to enhance economic cooperation between Indonesia and the Philippines through economic diplomacy, the promotion of Indonesian halal products, and the facilitation of business partnerships between entrepreneurs from both countries. The study employs a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as literature reviews and interviews. The findings indicate that KJRI plays a strategic role in establishing a halal ecosystem in Mindanao by encouraging regulation, halal certification, and strengthening networks among stakeholders. However, challenges such as differences in halal regulations and limited public awareness of Indonesian halal products remain major obstacles. Therefore, synergy between the government, the private sector, and Islamic organizations is needed to further expand the halal industry in the region.

Keyword: KJRI, halal industry, economic diplomacy, Mindanao, Philippines

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya industri halal dan berupaya untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhannya. Melalui berbagai regulasi dan program, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,

pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Pemerintah juga aktif dalam mempromosikan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan dukungan kebijakan tersebut, industri halal diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Maulana et al., 2024).

Indonesia kini memosisikan diri sebagai pusat halal dunia dan pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal. Berbagai regulasi seperti Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memperkuat kerangka hukum produk halal. Ketentuan teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 menyebutkan bahwa label pangan merupakan keterangan tentang pangan yang disertakan pada kemasan, baik dalam bentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya. Label pangan ini berfungsi memberikan informasi kepada konsumen agar dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi suatu produk, serta memberikan keuntungan bagi pelaku usaha melalui peningkatan loyalitas konsumen.

Presiden Joko Widodo telah mengusulkan pembangunan Global Halal Hub Indonesia sebagai strategi membawa bisnis Indonesia ke pasar global. Hub halal ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi pariwisata dan produksi makanan halal, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai eksportir makanan halal terbesar di dunia (Istiqlal, 2023). Dengan meningkatnya jumlah rumah tangga muslim di dunia, optimalisasi sumber daya halal di Indonesia dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Upaya ini juga membuka peluang kerja sama internasional dengan negara-negara lain, termasuk Filipina, yang turut mengembangkan industri halal.

Tabel 1. Data Ekspor-Import di Filipina 2019-2024

Tahun	Ekspor ke Indonesia	Import dari Indonesia	Komoditas	
			Ekspor	Import
2019	0.5	6.0	Buah, kopi,	Minyak Kelapa Sawit,
2020	0.6	7.1	kakao, Produk Kelapa,	Karet, Makanan dan
2021	1.4	7.0	Peralatan Elektronik,	Minuman,
2022	1.0	7.9	Obat-Obatan, Makanan	Elektronik, Pakaian dan
2023	1.6	8.1	Olahan, Produk Hasil	Tekstil, Minyak dan Batu
2024	1.4	8.4	Laut	Bara

Sumber: Philippine Statistics Authority (2025)

Berdasarkan data di atas, aktivitas ekspor dan impor antara Filipina dan Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, nilai impor dari Indonesia ke Filipina masih cenderung lebih besar dibandingkan ekspor dari Filipina ke Indonesia. Komoditas utama yang menjadi objek perdagangan kedua negara, seperti makanan olahan, obat-obatan, dan produk hasil laut, sangat membutuhkan kejelasan status kehalalan produk. Hal ini semakin relevan karena Mindanao merupakan pusat industri halal di Filipina.

Penduduk Filipina berjumlah sekitar 105 juta orang dengan mayoritas beragama Katolik Roma (80,6%), sementara penduduk Muslim hanya sekitar 5,6% dan sebagian besar tinggal di wilayah Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) (CIA, 2019). Meskipun minoritas, Filipina menjadi salah satu negara ASEAN yang aktif mengembangkan industri halal karena menyadari meningkatnya permintaan produk halal di pasar global. Filipina bahkan menargetkan untuk menguasai 30% pasar halal ASEAN (Dubé et al., 2016). Menariknya, industri makanan halal di Filipina juga diminati oleh masyarakat nonmuslim karena dianggap lebih aman dan higienis

(Liba et al., 2018). Mindanao dipilih sebagai pusat industri halal karena populasi muslim yang besar serta potensinya dalam menjangkau pasar halal domestik dan regional.

Namun, pertumbuhan industri halal di Filipina masih menghadapi tantangan, terutama karena sertifikasi halal belum terpusat pada lembaga resmi pemerintah. Selama ini sertifikasi halal lebih banyak dilakukan oleh lembaga swasta, dan pemerintah tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaannya (Akim et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem sertifikasi yang terkoordinasi dan diakui secara internasional. Di sisi lain, Indonesia telah memiliki pengalaman dan infrastruktur halal yang lebih matang, antara lain melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keunggulan ini memberikan peluang kerja sama bilateral yang strategis antara kedua negara, khususnya melalui peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Davao City dalam memfasilitasi promosi dan kolaborasi industri halal di Mindanao (Iswanaji et al., 2024).

Kerja sama halal Indonesia–Filipina tidak hanya relevan dari sisi perdagangan, tetapi juga dalam konteks diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan strategi penting bagi negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi melalui negosiasi, investasi, dan kebijakan strategis (Rana, 2011); Setiawan & Sulastri, 2020). Diplomasi ini melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam konteks Indonesia, diplomasi ekonomi digunakan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing industri halal di tingkat global. Upaya KJRI Davao City dalam menjalin hubungan ekonomi halal dengan Mindanao dapat dilihat sebagai implementasi diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN bagian selatan.

Selain memperkuat jejaring perdagangan, diplomasi ekonomi halal juga berfungsi dalam memperluas pengaruh kepentingan nasional. Kepentingan nasional sendiri merupakan tujuan utama negara dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat (Burchill, 2005; Jemadu, 2008). Dalam hal ini, kerja sama industri halal bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia sekaligus memperluas jangkauan ekonomi syariah di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan nasional vital yang menempatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri.

Penguatan regulasi dan sistem sertifikasi halal menjadi salah satu faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan industri halal di kedua negara. Indonesia melalui BPJPH telah menetapkan standar yang terintegrasi, sementara Filipina masih membutuhkan koordinasi antar lembaga sertifikasi swasta. Kerja sama bilateral antara BPJPH dan otoritas halal Filipina penting untuk harmonisasi standar dan pengakuan sertifikat halal lintas negara. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi aspek penting agar pelaku usaha, terutama UMKM, mampu memenuhi standar halal yang ditetapkan. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai pelatihan bagi pelaku usaha, sementara di Filipina, program pelatihan halal masih terbatas dan dapat difasilitasi melalui kerja sama dengan KJRI Davao (Shandoya et al., 2024).

Aspek digitalisasi turut memainkan peran penting dalam pengembangan industri halal. Pemanfaatan teknologi digital dalam *e-commerce* halal memungkinkan produk Indonesia menjangkau pasar global, termasuk Filipina (Dewi & Hakiki, 2023). Kolaborasi antar platform *e-commerce* halal dapat memperkuat distribusi dan memperluas penetrasi pasar. Selain itu, sektor pariwisata halal memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya di Mindanao yang memiliki kekayaan budaya dan alam yang dapat menarik wisatawan muslim dari Indonesia dan negara lain. Kolaborasi antara pelaku pariwisata halal kedua negara dapat menciptakan paket wisata yang memenuhi standar halal dari sisi makanan, akomodasi, hingga fasilitas ibadah.

Dalam konteks teori hubungan internasional, penguatan kerja sama halal Indonesia–Filipina juga dapat dianalisis melalui pendekatan Rational Actor Model (Alden, 2017; Mintz & DeRouen Jr (2018). Model ini menjelaskan bahwa negara bertindak sebagai aktor rasional yang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan logis untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Dalam hal ini, kebijakan Indonesia untuk memperkuat diplomasi ekonomi halal di Mindanao merupakan keputusan strategis yang didasarkan pada perhitungan manfaat

ekonomi, politik, dan sosial jangka panjang. Dengan pendekatan rasional, Indonesia berupaya mengoptimalkan sumber daya halal nasional untuk memperluas pasar dan memperkuat posisi globalnya dalam industri halal.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan (gap) yang menarik untuk dikaji lebih dalam, yaitu bagaimana peran diplomasi ekonomi melalui KJRI Davao City dalam mempromosikan industri halal Indonesia di Filipina, khususnya di Mindanao. Meskipun telah terdapat banyak penelitian tentang industri halal di Indonesia dan pengembangannya di Filipina, kajian yang menyoroti diplomasi ekonomi lintas negara dalam konteks ini masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada analisis peran diplomasi ekonomi Indonesia dalam penguatan jejaring halal lintas negara melalui pendekatan aktor rasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan KJRI Davao City dalam mempromosikan industri halal Indonesia di Mindanao, Filipina, serta menelaah strategi dan tantangan yang dihadapi dalam memperkuat kerja sama bilateral di sektor halal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian diplomasi ekonomi dan hubungan internasional, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis dalam pengembangan industri halal lintas negara di kawasan ASEAN.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan memberikan gejala, fakta atau kejadian atau secara sistematis dan akurat mengenai problematika yang terjadi sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh objek dalam penelitian (Hikmawati, 2020).

Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konteks dan dinamika yang berlangsung, dengan fokus pada interpretasi makna di balik data yang dikumpulkan. Penelitian ini secara khusus dilakukan terhadap Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Davao City, wilayah Mindanao, Filipina, sebagai subjek utama dalam mengidentifikasi dan mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan tugas diplomatik dan kepentingan nasional Indonesia di wilayah tersebut.

Jenis data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan secara langsung dari sumber-sumber yang relevan dan berkompeten melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat dan staf KJRI yang memiliki otoritas serta pemahaman terhadap isu yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap realitas yang ada.

Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dimulai dari proses reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan akan ditelusuri, diinterpretasikan, dan dianalisis untuk menemukan pola-pola tertentu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian diplomasi serta kebijakan luar negeri Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertukaran Informasi Pasar Halal Indonesia-Filipina melalui KJRI

Kehadiran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City memiliki peran strategis dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya melalui pengembangan industri halal. Sebagai representasi diplomatik di wilayah selatan Filipina yang berpenduduk mayoritas Muslim, KJRI Davao City berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pelayanan konsuler, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang menjembatani kerja sama perdagangan, investasi, dan transfer pengetahuan antarnegara. Upaya ini sejalan dengan agenda pemerintah Indonesia untuk memperluas pengaruh ekonomi melalui diplomasi berbasis nilai-nilai halal yang berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing regional.

Dalam pelaksanaannya, KJRI Davao City aktif menginisiasi berbagai kegiatan seperti forum bisnis, pameran produk halal, serta pelatihan sertifikasi dan regulasi halal bagi pelaku usaha. Program-program ini dirancang untuk memperkenalkan keunggulan sistem halal Indonesia sekaligus membangun kesadaran ekonomi syariah di Filipina. Melalui kerja sama dengan instansi seperti BPJPH, MUI, dan lembaga sertifikasi lokal, KJRI berperan sebagai penghubung dalam memperluas jejaring halal *supply chain* di kawasan Mindanao dan sekitarnya.

Upaya KJRI Davao City berdampak nyata dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat referensi industri halal di Asia Tenggara. Diplomasi ekonomi yang dijalankan tidak hanya meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke Filipina, tetapi juga membuka ruang bagi kerja sama pendidikan, penelitian, dan pelatihan tenaga ahli di bidang halal. Selain itu, KJRI berhasil menumbuhkan minat investor Filipina untuk mempelajari model pengelolaan ekosistem halal Indonesia, terutama dalam aspek sertifikasi dan standarisasi produk.

Meskipun demikian, pelaksanaan diplomasi ekonomi ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur pendukung industri halal di Filipina, rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha lokal, serta perbedaan standar sertifikasi antarnegara. Faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional KJRI juga menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas cakupan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan dalam mendukung peran diplomasi ekonomi ini.

Secara keseluruhan, peran KJRI Davao City menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi berbasis industri halal dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Filipina dan meningkatkan daya saing ekonomi regional. Melalui kolaborasi lintas sektor, KJRI berkontribusi pada pembangunan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan. Model diplomasi yang dijalankan ini juga dapat menjadi contoh penerapan *soft power* Indonesia di kawasan ASEAN, di mana etika bisnis, kerja sama ekonomi, dan nilai-nilai keislaman berperan sebagai fondasi utama hubungan internasional yang saling menguntungkan.

Peran KJRI dalam Memfasilitasi Jaringan Bisnis Halal Indonesia-Filipina

Industri halal menjadi sektor strategis dalam diplomasi ekonomi Indonesia, dengan peluang besar berupa peningkatan investasi, perluasan pasar ke konsumen non-Muslim, serta dukungan kebijakan seperti “Making Indonesia 4.0” dan kebijakan bea impor yang kondusif. Namun, tantangan yang dihadapi masih signifikan, mencakup tingginya biaya sertifikasi halal, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi proses sertifikasi, serta ketatnya persaingan global (Latif et al., 2025). Dalam konteks hubungan bilateral, kemampuan pelaku usaha Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan mitra bisnis di Filipina menjadi kunci untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing industri halal.

Filipina, khususnya wilayah Mindanao, memiliki potensi pasar halal yang besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi kapasitas produksi halal domestiknya masih terbatas. Kondisi ini menciptakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas ekspor dan kerja sama ekonomi halal. Dalam hal ini, KJRI Davao City memiliki peran penting sebagai penghubung antara produsen halal Indonesia dan pelaku usaha di Filipina untuk memperkuat jaringan bisnis lintas negara serta menarik investasi di sektor tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, KJRI Davao telah berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pelaku usaha mengenai peluang pasar halal di Filipina dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan asosiasi bisnis di Mindanao. Namun, belum terdapat bukti kuat bahwa KJRI secara berkelanjutan memfasilitasi forum bisnis khusus yang mempertemukan pelaku usaha halal dari kedua negara secara langsung dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa peran fasilitasi KJRI masih dapat ditingkatkan agar lebih berdampak nyata terhadap pertumbuhan kemitraan bisnis halal.

Keterbatasan tersebut juga mencakup belum adanya keselarasan sistem sertifikasi halal antara Indonesia dan Filipina. Perbedaan standar dan pengakuan antar lembaga sertifikasi menjadi hambatan dalam memperlancar arus perdagangan produk halal kedua negara. Dalam

konteks ini, KJRI dapat berperan sebagai mediator untuk mempertemukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan otoritas sertifikasi halal Filipina guna menyusun mekanisme kerja sama yang saling mengakui standar halal, sehingga memudahkan perdagangan lintas negara.

Selain sektor makanan dan minuman, industri halal juga mencakup kosmetik, farmasi, fesyen Muslim, pariwisata halal, dan keuangan syariah. Potensi besar di sektor pariwisata halal, misalnya, dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara pelaku industri Indonesia dan Filipina dalam menarik wisatawan Muslim ke Mindanao. Namun, keterlibatan KJRI dalam memfasilitasi kerja sama di sektor-sektor non-pangan ini masih terbatas pada advokasi dan penyebaran informasi, belum pada tahap implementasi kemitraan bisnis yang konkret.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan inovasi strategi diplomasi ekonomi melalui pengembangan platform digital terpadu yang dirancang khusus bagi pelaku usaha halal kedua negara. Platform ini dapat berfungsi sebagai direktori bisnis lintas negara yang menyediakan informasi pasar, profil mitra potensial, dan peluang investasi secara *real-time*. Dengan demikian, pelaku usaha, terutama UMKM halal, dapat memperluas jaringan bisnis tanpa hambatan geografis maupun biaya tinggi.

Selain sebagai sarana komunikasi dan promosi, platform digital juga dapat berfungsi sebagai pusat edukasi yang menyediakan informasi tentang regulasi, sertifikasi halal, dan kebijakan perdagangan kedua negara. Fitur seperti webinar, pelatihan daring, serta pameran virtual memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memproduksi dan memasarkan produk halal. Inovasi digital ini sejalan dengan kebijakan Making Indonesia 4.0 yang menekankan transformasi teknologi dalam memperkuat daya saing industri nasional.

Dengan dukungan berkelanjutan dari KJRI, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas bisnis, pengembangan platform digital tersebut berpotensi menciptakan ekosistem industri halal yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia–Filipina, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam pengembangan industri halal di Asia Tenggara. Peran KJRI Davao City menjadi kunci dalam menjembatani kolaborasi lintas negara dan memastikan bahwa nilai-nilai etika, inovasi, serta kepentingan ekonomi nasional berjalan selaras dalam kerangka diplomasi modern.

Peran KJRI dalam Promosi Industri Halal di Mindanao

Industri halal mencakup seluruh proses produksi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, mulai dari bahan baku hingga distribusi produk. Tren gaya hidup halal (*halal lifestyle*) semakin populer secara global, termasuk di Filipina, karena mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi yang etis dan sesuai ajaran agama (Ula'm et al., 2023). Hal ini mendorong munculnya permintaan yang lebih besar terhadap produk dan layanan halal lintas sektor, seperti makanan, kosmetik, dan pariwisata.

Mindanao, yang memiliki populasi Muslim terbesar di Filipina, berpotensi besar menjadi pusat industri halal nasional. Pemerintah melalui Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) telah diberi mandat untuk mengembangkan sektor halal sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat Muslim. Namun, pengembangannya masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, regulasi yang belum matang, serta rendahnya kesadaran publik terhadap potensi ekonomi industri halal.

Dalam konteks ini, KJRI Davao memainkan peran penting sebagai jembatan diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Filipina. KJRI aktif menyampaikan informasi dan melakukan komunikasi dengan pemerintah lokal serta pelaku usaha di Mindanao terkait potensi industri halal. Namun, aktivitas promosi yang dilakukan masih bersifat sporadis, belum terkoordinasi dalam kerangka strategi jangka panjang yang sistematis dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat efektivitas promosi, KJRI dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Mindanao dalam meningkatkan literasi halal generasi muda. Melalui seminar, lokakarya, dan kolaborasi akademik, kesadaran tentang pentingnya industri halal dapat diperluas. Strategi ini sejalan dengan pandangan Jannah & Malahayatic (2024) dan Mardi (2023) yang menekankan pentingnya edukasi, riset, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam

memperkuat industri halal.

Selain pendidikan, KJRI dapat memperluas promosi melalui kegiatan berskala besar seperti halal expo atau festival produk halal Indonesia–Filipina. Acara semacam ini berfungsi sebagai sarana promosi, jejaring bisnis, dan diplomasi budaya yang dapat mempererat kerja sama antar pelaku usaha. KJRI juga dapat memfasilitasi pengembangan infrastruktur halal, termasuk pusat sertifikasi dan fasilitas produksi, dengan menjembatani kerja sama teknis antara Mindanao dan institusi halal di Indonesia.

Penguatan kerja sama antar UMKM menjadi fokus penting lainnya. KJRI dapat berperan dalam program pelatihan, pendampingan, dan transfer teknologi agar UMKM di Filipina dapat memenuhi standar halal internasional. Di samping itu, harmonisasi sistem sertifikasi halal antara Indonesia dan Filipina menjadi agenda strategis agar produk halal kedua negara dapat lebih mudah menembus pasar satu sama lain tanpa hambatan regulasi.

KJRI juga berpotensi memperluas promosi ke sektor pariwisata halal, mengingat potensi alam dan budaya Mindanao yang kaya. Kolaborasi antara industri wisata halal Indonesia dan Filipina dapat menciptakan paket wisata ramah Muslim, memperkuat ekonomi lokal sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Untuk memperluas jangkauan promosi, KJRI dapat memanfaatkan platform digital, media sosial, dan *e-commerce* sebagai sarana *branding* produk halal Indonesia di Filipina.

Secara keseluruhan, peran KJRI Davao dalam promosi industri halal di Mindanao sudah strategis tetapi masih perlu diperkuat melalui program yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Diperlukan dukungan terhadap harmonisasi regulasi, penguatan SDM, peningkatan infrastruktur, serta forum bisnis yang berkelanjutan. Dengan strategi yang lebih komprehensif, KJRI dapat berkontribusi signifikan dalam menjadikan Mindanao sebagai pusat industri halal regional dan mempererat hubungan ekonomi Indonesia–Filipina secara berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa KJRI Davao memiliki peran penting dalam mendorong pertukaran informasi mengenai industri halal antara Indonesia dan Filipina, khususnya dalam berbagi pengalaman terkait kebijakan, regulasi, dan ekosistem halal yang telah berkembang di Indonesia. Filipina, yang masih berada dalam tahap awal pengembangan industri halal, menghadapi tantangan seperti belum adanya sistem sertifikasi nasional yang terintegrasi, kurangnya pemahaman masyarakat, serta hambatan dalam membangun jejaring bisnis halal. Meskipun KJRI telah memberikan informasi dan advokasi terkait industri halal, penelitian ini menemukan bahwa peran mereka dalam memfasilitasi kemitraan bisnis masih terbatas, karena belum adanya forum bisnis khusus yang mempertemukan pelaku usaha halal dari kedua negara secara berkelanjutan. Dalam aspek promosi, KJRI juga telah berkontribusi dalam memperkenalkan industri halal Indonesia di Mindanao, namun upaya tersebut masih sporadis dan belum terstruktur secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih konkret dan berkelanjutan untuk memperkuat kerja sama industri halal antara Indonesia dan Filipina, baik dalam pertukaran informasi, fasilitasi jaringan bisnis, maupun promosi industri halal di Mindanao.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, Purnama, C., & Konety, N. (2020). *Tata Kelola Sertifikasi Halal & Dinamika Industri Halal*. ITB Press.
- Alden, C. (2017). Critiques of the Rational Actor Model and Foreign Policy Decision Making. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.474>
- Burchill, S. (2005). *The national interest in international relations theory* (Third Edit). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230005778>
- CIA. (2019). *Philippines*. Central Intelligence Agency.

- Dewi, A. P., & Hakiki, M. I. (2023). Transformasi Digital dalam Industri Halal di Indonesia (Studi Implementasi Teknologi Blockchain dalam Proses Sertifikasi Halal). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 360–370. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.240>
- Dubé, F. N., HaiJuan, Y., & Lijun, H. (2016). Halal certification system as a key determinant of firm internationalisation in the Philippines and Malaysia. *Asian Academy of Management Journal*, 21(1), 73–88.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
- Istiqlal, F. (2023). Membangun Global Halal Hub Indonesia: Strategi dan Peluang untuk Mencapai Kompetitif di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 3(2), 72–85. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i2.614>
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfikar, A. L., Romli, N. A., Safitri, D., Mahardika, S. G., Kurnia, R., Hasan, D. H., Hariyanti, Nurhasanah, S., Nissa, I. K., Fahrullah, A., Huda, M. W. S., Sugianto, Susanti, S., Nisa, R. K., Fitriyanti, E., Yuniawati, R. I., ... Asmanto, E. (2024). *Perkembangan Industri Halal dan Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*. Adanu Abimata.
- Jannah, M., & Malahayatic. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia. *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 55–64.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Graha Ilmu.
- Latif, A. N., Alianita, M., Musaadah, W., & Hidayat, R. (2025). Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang Industri Halal Kosmetik dan Obat-Obatan Menuju Wajib Halal 2026 : Analisis SWOT. *Indonesian Journal of Halal*, 7(2), 146–155.
- Liba, R. T., Matsuzawa, M. P., Coronel, J. V., Silva, M. J. T. de, Dumaoal, M. S. P., Marilla, R. M. F., & Tarca, J. C. D. (2018). Awareness and Willingness on Halal Certification of Non-Halal Restaurant Owners in Manila. *TEAM Journal of Hospitality and Tourism*, 15(1).
- Mardi, M. (2023). Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Pasar Global Dengan Produk Halal. *Journal of Economic and Islamic Research*, 2(1), 97–114.
- Maulana, K., Nasiruddin, M., & Ahmad, Z. I. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia. *Tijaratana : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 05(02).
- Mintz, A., & DeRouen Jr, K. (2018). The Rational Actor Model. In *Understanding Foreign Policy Decision Making* (pp. 57–67). Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511757761.004>
- Philippine Statistics Authority. (2025). *International Merchandise Trade Statistics of the Philippines*. PsA.Gov.Ph.
- Rana, K. S. (2011). 21st-Century Diplomacy: A Practitioner's Guide. In *21st-Century Diplomacy: A Practitioner's Guide*. The Continuum International Publishing Group. <https://doi.org/10.5040/9781501300875>
- Setiawan, A., & Sulastri, E. (2020). *Model Diplomasi Ekonomi ke Pasar Non-Tradisional*. UMJ Press.
- Shandoya, T. M., Syahrizal, T., Muftahuddin, & Najla. (2024). Analisis Pembangunan Industri Halal Kawasan Ekonomi Khusus Halal Bersela di Kabupaten Aceh Barat Daya: Prospek dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 6(2), 325–336.
- Ula'm, F., Hasmi, W., Putri, A. B., & Setiyowati, A. (2023). Penguatan Halal Value Chain “Pengembangan Halal Indutri : Sertifikasi, Peluang Dan Tantangan.” *Jurnal Mas Mansyur*, 1(2), 71–84.